Jurnal Aktor
Vol. 1, No. 2, Februari 2022
p-ISSN: 2808-4365, e-ISSN: 2808-5167

Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Hasil Tambak Studi Kasus Kelompok Tani di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

The Role of Local Governments in Increasing Pond Yield Case (Study of A Farmer's Group in North Sinjai Spectacle, Sinjai Regency)

Fahruddin, Sulmiah*

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Makassar
Email : Sulmiah@unm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang peran pemerintah daerah dalam peningkatan hasil tambak kelompok tani di Kecematan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan melalui cara triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan kondensasi data,penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Hasil Tambak Kelompok Tani di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan yaitu kondisi sosial dan ekonomi. Sasaran dari kebijakan Pemerintah adalah masyarakat terhadap hasil tambak. Sumberdaya yang digunakan yaitu sumber daya manusia dan sumber daya peralatan. Karakteristik Organisasi Pelaksana yaitu Pemerintah Daerah, Dinas Perikanan yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan hasil tambak, Kelompok Tani sebagai penerima hasil tambak. Koordinator Penyuluh sebagai pelaksana konfirmasi hasil tambak kepada Kelompokk Tani di Kabupaten Sinjai terlihat dukungan yang baik dari para implementor, bentuk dukungan yang diberikan yaitu memberikan pelayanan yang cepat tanggap kepada masyarakat mengenai Hasil Tambak.Lingkungan Sosial,ekonomi, dan Politik masyarakat masih ada yang belum menerima dengan baik kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dikarenakan tingkat ekonomi masyarakat yang berbeda-beda.

Kata Kunci: *Pemerintah Daerah; Hasil Tambak; Petano*

ABSTRACT

This study aims to determine the description of the role of local government in increasing the yield of farmer groups in North Sinjai Sub-district, Sinjai Regency. This type of research is descriptive qualitative research with data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation. The checking of the validity of the data is done through triangulation of sources. Data analysis techniques using data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the role of the local government in increasing the yield of farmer groups in North Sinjai District, Sinjai Regency is going well, although there are still several indicators that need to be considered, namely social and economic conditions. The target of the Government's policy is the community towards the results of the fishpond. The resources used are human resources and equipment resources. The characteristics of the implementing organization are the Regional Government, the Fisheries Service in charge of managing the management of pond products, and the Farmer Group as recipients of the results of the pond. The Extension Coordinator

as the executor of confirmation of the results of aquaculture to the farmer groups in Sinjai Regency shows good support from the implementors, the form of support provided is to provide services that are responsive to the community regarding the results of ponds. The social, economic, and political environment of the community still has not received well the policies issued by the Regional Government due to the different economic levels of the community. ***Keywords:*** *Implementation, Legislation, Ranperda*

Keywords: *Local Government; Pond Product; Farmer's*

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir dan laut memiliki potensi habitat yang beragam seperti sumber daya ikan dan ekosistem hutan mangrove yang kaya akan keanekaragaman hayati misalnya, ikan, udang, burung, mamalia darat, reptil dan lain-lain (Kustanti, 2011; Vincentius, 2020). Selain itu wilayah pesisir mempunyai peran dan fungsi sosial ekologi yang sangat penting bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya perairan pantai dan laut menjadi paradigma baru kebijakan pembangunan di masa sekarang ini yang dilaksanakan secara rasional dan berkelanjutan (Waluyo, 2014). Kebijakan ini sangat realistis karena didukung oleh fakta adanya potensi sumber daya pantai dan laut yang masih cukup besar peluangnya untuk pengembangan eksploitasi di bidang perikanan tangkap maupun perikanan budidaya khususnya budidaya tambak (Maulina dkk., 2012 dalam Firmansyah, 2013)

Potensi sumber daya perairan Indonesia yang besar membuat bidang perikanan menjadi salah satu aspek yang diprioritaskan bagi Pembangunan Nasional Indonesia. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk : (1) Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil; (2) Meningkatkan penerimaan dan devisa negara; (3) Mendorong perluasan kesempatan kerja; (4) Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan; (5) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan; (6) Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing; (7) Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan; (8) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan dan (9) Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Pengembangan tambak yang melampaui daya dukung lingkungan akan menimbulkan berbagai dampak ikutan, yang mungkin semakin sulit diatasi. Daya

dukung lahan pantai untuk pertambakan ditentukan oleh : mutu tanah, mutu air sumber (asin dan tawar), hidrooseanografi (arus dan pasang surut), topografi dan klimatologi daerah pesisir dan daerah aliran sungai di daerah hulu (Hadie dkk., 2017).

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi lahan untuk budidaya tambak ± 716,15 hektar yang tersebar di sembilan Desa/Kelurahan pada tiga wilayah kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Tellulimpoe (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai, 2012 dalam Firmansyah, 2013). (M, 2019) Sampai saat ini budidaya tambak di Kabupaten Sinjai masih berlangsung, namun menghadapi berbagai kendala dan permasalahan yang disebabkan antara lain tingginya harga sarana produksi, adanya kecendrungan menurunnya kualitas lingkungan pesisir dampak dari bahan pencemaran baik yang berasal dari luar maupun dari dalam lingkungan perairan pesisir, masih rendahnya penerapan teknologi usaha budidaya, dan belum optimalnya pembinaan petani dan kelembagaannya (Firmansyah dkk., 2021; Wahyuni dkk., 2020).

Komoditi utama yang dibudidayakan di Kabupaten Sinjai pada umumnya adalah ikan bandeng udang windu dan rumput laut Gracillaria sp baik secara monokultur maupun polikultur (Mulyani & Indrawati, 2021). Dalam era otonomi daerah saat ini menuntut pemerintah Kabupaten Sinjai untuk dapat membangun dan mengembangkan wilayahnya dengan memanfaatkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Tantangan dan permasalahan dalam usaha budidaya tambak perlu diperhatikan, karena selain menjadi tantangan juga dapat menjadi ancaman untuk pengembangan selanjutnya (Jamal dkk., 2018). Oleh sebab itu kegiatan perikanan budidaya tambak di daerah Kabupaten Sinjai perlu dikembangkan berdasarkan deversifikasi kultivan dan penerapan teknologi budidaya yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya (Firmansyah, 2013; Mansyur & Tonnek, 2003).

Menurut Yerlin (2021), pada dasarnya pengetahuan dan wawasan yang memadai dari kegiatan penyuluhan dinilai dapat digunakan untuk memecahkan sebagian masalah yang dihadapi oleh petani begitupun petani tambak di Kecamatan Sinjai Utara, akan tetapi pada kenyataannya masih ditemui di lapangan bahwa kelompok petani tambak masih kurang akan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga kemasyarakatan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui seberapa baik Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Hasil Tambak Kelompok Tani Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, maka itu penulis tertarik untuk meneliti "Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Hasil Tambak Studi Kasus Kelompok Tani Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Dimana data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen, catatan memo dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2004).

Instrumen utama yang dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kapasitas Penyuluh Tani Tambak di Kabupaten Sinjai, dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data,melakukan pengumpulan data, analisis data, menilai kualitas data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2011). Selain itu untuk melengkapi data maka digunakan pedoman wawancara dan pedoman pengamatan (kamera/video) .

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dokumentasi, pengecekan keabsahan data (Arikunto, 2006). Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan dibagian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Pengembangan SDM dengan latihan dan keterampilan

Pengembangan SDM dengan Latihan dan Keterampilan merupakan kunci utama dalam pembangunan sumberdaya manusia. Maka itu untuk mewujudkan semuanya, pemerintah harus dapat melakukan apa yang menjadi hal utama untuk mencapai tujuan tersebut, dengan menambah pengetahuan serta keterampilan penyuluh.

Berdasarkan observasi yang peneliti peroleh bahwa keberadaan penyuluh perikanan di Kabupaten Sinjai yang berjumlah 13 orang ditambah dengan 1 orang koordinator dan 1 orang fungsional Kabupaten. Ke 13 orang penyuluh tersebut memiliki status Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam melaksanakan tugas sebagai penyuluh perikanan di Kabupaten Sinjai telah diberikan dan mendapatkan beberapa pembekalan seperti pengembangan Sumber Daya Manusia dengan latihan dan keterampilan.

Keterangan yang penulis peroleh tersebut tentunya menjadi masukan bagi penulis bahwa peran pemerintah sangat penting dalam peningkatan pengembangan sumber daya penyuluh perikanan yaitu sebagai fasilitator. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengembangan sumber daya penyuluh perikanan dapat berupa pemberian mandat, izin, kelengkapan kegiatan serta biaya yang diberikan.

Keterangan yang disampaikan oleh para informan memberikan keyakinan bahwa benar adanya para penyuluh perikanan di Kabupaten Sinjai dalam pengembangan sumber dayanya telah diberikan beberapa jenis pelatihan dan pendidikan, adapun kegunaan dari pelatihan yang diberikan tersebut tentunya sebagai penambahan ilmu yang sebelumnya telah mereka dapatkan pada bangku sekolah yang sesuai dengan gelar yang mereka capai.

Hasil wawancara dengan Jumain, S.Pi yang merupakan salah satu penyuluh perikanan mengungkapkan bahwa:

> "Pelatihan yang saya dapat sangat bermanfaat sekali, selain untuk pengembangan sumber daya kepegawaian juga pengembangan keilmuan pun dapat diperoleh didalamnya" (Wawancara tanggal 4 Agustus 2021).

Keterangan lain yang penulis peroleh juga dari seperti dari Emil Salim, S.Pi yang menyatakan bahwa:

> "Jenis pelatihan yang saya dapatkan yaitu kompotensi sertifikat supervisor, kompetensi sertifikasi teknis, Lat. Das. Alih penyuluh perikanan" (Wawancara tanggal 4 Agustus 2021).

Keterangan yang penulis peroleh tersebut semakin memberikan keyakinan bahwa benar adanya para penyuluh perikanan di Kabupaten Sinjai tidak hanya berbekalkan latar belakang pendidikan saja mereka menjadi penyuluh akan tetapi mereka juga diberikan pelatihan dan pendidikan lanjutan guna meningkatkan sumber daya manusia penyuluh itu sendiri.

Hasil wawancara dengan salah satu anggota kelompok tani/ternak udang dan rumput laut di Kecamatan Sinjai Utara Ridwan mengungkapkan bahwa:

> "Menurut saya kualitas penyuluh atau pendamping kami sudah cukup baik" (Wawancara tanggal 5 Agustus 2021).

Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa peran pemerintah dalam pengembangan sumber daya penyuluh perikanan yang telah diberikan seperti pelatihan dan pendidikan (kompetensi sertifikat advisor, kompetensi sertifikat teknis, latihan alih jenjang penyuluh perikanan). Peran pemerintah sangat penting dalam peningkatan pengembangan sumber daya penyuluh perikanan yaitu sebagai fasilitator. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengembangan

sumber daya penyuluh perikanan dapat berupa pemberian mandat, izin, kelengkapan kegiatan serta biaya yang diberikan.

2) Meningkatkan Kapasitas Penyuluh

Untuk meningkatkan sarana dan Kapasitas masyarakat pemerintah harus dapat memberikan peluang dorongan semangat bagi penyuluh agar masyarakat dalam ikut berpastisipasi dalam membangunan sumber daya manusia di Kabupaten Sinjai khususnya bagi petani tambak.

Hasil wawancara dengan Rokit, S.Pi yang merupakan koordinator penyuluh perikanan mengungkapkan bahwa:

> "Kapasitas penyuluh perikanan tentunya bukan hanya sebagai penyuluh tetapi mereka dapat mengembangakn dirinya dengan pemberian informasi- informasi penting bagi petani tambak"(Wawancara tanggal 5 Agustus 2021).

Hasil keterangan yang disampaikan oleh informan adalah memberikan bukti nyata bahwa penyuluh perikanan sangat bermanfaat pada masyarakat tani tambak di Kabupaten Sinjai, dimana mereka dapat meminta keterangan tentang cara pembudidayaan kepada anggota tani tambak demikian pula dari penyuluh perikanan anggota tani tambak dapat memperoleh informasi lain seperti jika ada bantuan bibit dan lain sebagainya.

Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa peran pemerintah dalam peningkatan kapasitas penyuluh tani tambak sudah maksimal dan kemampuan yang mereka miliki selanjutnya mereka aplikasikan kepada anggota kelompok tani tambak, dimana mereka dapat meminta keterangan tentang cara pembudidayaan kepada anggota tani tambak demikian pula dari penyuluh perikanan anggota tani tambak dapat memperoleh informasi lain seperti jika ada bantuan bibit dan lain sebagainya.

3) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kapasitas Penyuluh Tani Tambak di Kabupaten Sinjai.

Fa**ktor Internal**

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan kemudahan kepada penyuluh perikanan untuk melakukan peningkatan kapasitasnya dengan menjadi fasilitator dan menyiapkan anggaran yang besar kecil jumlahnya harus bisa mencukupi segala keperluan penyuluh dalam proses peningkatan kapasitas. Berdasarkan hasil observasi terungkap bahwa faktor internal lain yang mempengaruhi peran pemerintah dalam peningkatan kapasitas penyuluh tani tambak di Kabupaten Sinjai adalah terbatasnya jumlah penyuluh tani tambak, sehingga

pemerintah daerah menginisiatifkan kepada semua penyuluh perikanan harus mampu dan memiliki kecakapan ilmu dalam keterbatasan jumlah penyuluh tani tambak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor internal lain yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas penyuluh perikanan tani tambak adalah keterbatasan penyuluh itu sendiri sehingga perlu diberikan pengembangan kapasitas demi menambah keilmuan dan pengalaman para penyuluh.

Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil observasi terungkap bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi peran pemeintah dalam peningaktan kapasitas penyuluh tani tambak adalah kemajuan zaman dan kondisi alam memberikan dampak kepada pengetahuan seseorang termasuk pengetahuan penyuluh. Berdasarkan hasil observasi terungkap bahwa faktor eksternal lain yang mempengaruhi perlunya peran pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas penyuluh tani tambak adalah masih kurangnya sumbe daya tani tambak di Kabupaten Sinjai.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian tentang "Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kapasitas Penyuluh Tani/Tambak di Kabupaten Sinjai adalah peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapasitas penyuluh tani tambak di Kabupaten Sinjai yang ditinjau dari pengembangan SDM dengan latihan dan keterampilan, serta meningkatkan kapasitas penyuluh. Peran pemerintah dalam peningkatan kapasitas penyuluh tani tambak sudah maksimal dan kemampuan yang mereka miliki selanjutnya mereka aplikasikan kepada anggota kelompok tani tambak, dimana mereka dapat meminta keterangan tentang cara pembudidayaan kepada anggota tani tambak demikian pula dari penyuluh perikanan anggota tani tambak dapat memperoleh informasi lain seperti jika ada bantuan bibit dan lain sebagainya.

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapasitas penyuluh tani tambak di Kabupaten Sinjai yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi peran pemerintah dalam peningkatan kapasitas penyuluh tani tambak di Kabupaten Sinjai adalah adanya penyediaan anggaran yang besar kecilnya harus bisa mencukupi segala keperluan penyuluh dalam proses peningkatan kapasitas penyuluh tani tambak; dan batasnya jumlah penyuluh tani tambak, sehingga pemerintah daerah menginisiatifkan kepada semua penyuluh perikanan harus mampu dan memiliki kecakapan

ilmu dalam keterbatasan jumlah penyuluh tani tambak. Faktor eksternal yang mempengaruhi peran pemeintah dalam peningkatan kapasitas penyuluh tani tambak adalah kemajuan zaman dan kondisi alam memberikan dampak kepada pengetahuan seseorang termasuk pengetahuan penyuluh; dan masih kurangnya sumbe daya tani tambak di Kabupaten Sinjai

Saran

Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai agar mengajukan permohonan penambahan jumlah penyuluh perikanan tani tambak di Kabupaten Sinjai. Selain itu, juga disarakan kepada penyuluh tani tambak agar lebih produktif lagi untuk melakukan kunjungan kepada anggota tani tambak dan rutin melakukan koordinasi dengan pihak instansi.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penilaian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Asdy Mahasatya.

Firmansyah, M. (2013). *Analisis Pengembangan Budidaya Tambak di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Kecamatan Sinjai Timur)*.

Firmansyah, M., Tenriawaruwaty, A., & Hastuti, H. (2021). Studi Kualitas Air untuk Budidaya Ikan Bandeng (Chanos chanos Forsskal) di Tambak Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur. *Tarjih: Fisheries and Aquatic Studies*, *1*(1), 14–24.

Hadie, W., Hadie, L. E., & Supangat, A. (2017). Teknik Budidaya Ikan. *Bharata Karya Aksara*.

Jamal, M., Muhibuddin, A., & Indrawati, E. (2018). Identifikasi Potensi dan Strategi Pengembangan Budidaya Ikan Bandeng (Chanos chanos Forskall) di Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. *Journal of Aquaculture and Environment*, *1*(1), 11–14.

Kustanti, A. (2011). *Manajemen hutan mangrove*. PT Penerbit IPB Press.

M, N. (2019). *Analisis SWOT Budidaya Tambak Udang di Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe*.

Mansyur, A., & Tonnek, S. (2003). Prospek Budidaya Bandeng dalam Karamba Jaring Apung Laut dan Muara Sungai. *Jurnal Litbang Pertanian*, *22*(3), 79–85.

Moleong, L. J. ; (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. //library.fmipa.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=9039&keywords=

Mulyani, S., & Indrawati, E. (2021). *Budidaya Rumput Laut Potensi Perairan Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan*. Pusaka Almaida.

Sugiyono. (2011). *Metode Peneltian Kauntitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabet.

Vincentius, A. (2020). *Sumber Daya Ikan Ekonomis Penting Dalam Habitat Mangrove*. Deepublish.

Wahyuni, A. P., Firmansyah, M., Fattah, N., & Hastuti, H. (2020). Studi Kualitas Air untuk Budidaya Ikan Bandeng (Chanos chanos Forsskal) di Tambak Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur. *Agrominansia*, *5*(1), 106–113.

Waluyo, A. (2014). Permodelan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu yang Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Pulau Raas Kabupaten Sumenep Madura). *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, *7*(2), 75–85.

Yerlin, Y. (2021). *Efektivitas Penyuluhan Pertanian pada Lahan Sawah Irigasi di Kabupaten Luwu Timur*.

Perundangan

Departemen Pertanian. 2006. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006. *Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan*. Jakarta.

Departemen Pertanian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007. *Tentang Pedoman Pertumbuhan dan Pengembangan Kelompk Tani Dan Gabungan Kelompok Tani*. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Tersedia di https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_45.pdf